

BAB II TINJAUAN PUSAKA

2.1 Kota dan Perkotaan

Kota (*city*) merupakan suatu tempat di mana konsentrasi penduduk lebih padat dari wilayah sekitar karena terjadinya pemusatan kegiatan fungsional yang berkaitan dengan kegiatan atau aktivitas penduduknya. Dengan ungkapan yang berbeda, definisi kota yang lain adalah permukiman yang berpenduduk relatif besar, luas areal terbatas, pada umumnya bersifat non-agraris, kepadatan penduduk relatif tinggi, tempat sekelompok orang-orang dalam jumlah tertentu dan bertempat tinggal dalam suatu wilayah geografis tertentu, cenderung berpola hubungan rasional, ekonomis dan individualistis [14].

Selain pengertian kota (*city*), dikenal pula istilah perkotaan (*urban*) yang pengertiannya lebih luas menunjukkan ciri/karakteristik/sifat kekotaan [15]. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Kegiatan yang menjadi ciri kawasan perkotaan meliputi tempat permukiman perkotaan serta tempat pemusatan dan pendistribusian kegiatan bukan pertanian, seperti kegiatan pelayanan jasa pemerintahan, kegiatan pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi [3].

Adapun pengertian kota juga dapat ditinjau dari berbagai aspek yaitu; aspek geografis, fisik, demografis, statistik, sosial, ekonomi, dan administrasi. Berikut merupakan pengertian kota jika ditinjau dari beberapa aspek [15];

Tabel 2. 1 Pengertian Kota dilihat dari Berbagai Aspek

Lingkup	Pengertian Kota
Fisik	Suatu wilayah dengan wilayah terbangun (<i>built up area</i>) yang lebih padat dibandingkan dengan area sekitarnya
Demografis	Wilayah di mana terdapat konsentrasi penduduk yang dicerminkan oleh jumlah dan tingkat kepadatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan keadaan di wilayah sekitarnya

Lingkup	Pengertian Kota
Sosial	Suatu wilayah di mana terdapat kelompok-kelompok sosial masyarakat yang heterogen (tradisional-modern, formal informal, maju – terbelakang, dan sebagainya)
Geografis	Suatu wilayah dengan wilayah terbangun yang lebih padat dibandingkan dengan area sekitarnya
Statistik	Suatu wilayah yang secara statistik besaran atau ukuran jumlah penduduknya sesuai dengan batasan atau ukuran untuk kriteria kota
Ekonomi	Suatu wilayah di mana terdapat kegiatan usaha yang sangat beragam dengan dominasi di sektor non-pertanian, seperti perdagangan, perindustrian, pelayanan jasa, perkantoran, pengangkutan, dan lain-lain
Administrasi	Suatu wilayah yang dibatasi oleh suatu garis batas kewenangan administrasi pemerintah di daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sumber: Modul Perencanaan Kota Universitas Terbuka, 2014

Agar dapat lebih jelas mengetahui berbagai teori serta pembahasan mengenai kota maupun perkotaan serta mengetahui hubungan terkait perencanaan pada wilayah kota, maka pada pembahasan ini akan lebih dijelaskan kembali mengenai karakteristik kota, kawasan perkotaan serta fungsi dari kawasan perkotaan.

2.1.1 Pengertian Dasar

Sebagai disiplin ilmu pada aspek perencanaan wilayah dan kota, oleh karena itu perlunya pemahaman terhadap beberapa pengertian dasar, konsep atau terminologi yang berkaitan dengan wilayah/kawasan, kota/perkotaan, serta perencanaan kota. Dalam hal ini pengertian-pengertian dasar, konsep dan terminologi tersebut dapat diacu baik dari definisi-definisi yang selama ini dikemukakan oleh berbagai pakar maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Adapun berbagai pengertian tersebut, sebagai berikut;

1. Wilayah

- Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional [16].

2. Wilayah Kota

- Wilayah kota pada hakekatnya merupakan pusat kegiatan ekonomi yang dapat melayani wilayah kota itu sendiri maupun wilayah sekitarnya. Untuk dapat mewujudkan efektifitas dan efisiensi pemanfaatan ruang sebagai tempat berlangsungnya kegiatan-kegiatan ekonomi dan sosial budaya, kota perlu dikelola secara optimal melalui suatu proses penataan ruang [18].

3. Kawasan

- Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya [16].
- Wilayah yang batasannya bersifat fungsional [15].

4. Kawasan Perkotaan

- Wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi [15].
- Kawasan dengan karakteristik perkotaan merupakan kawasan yang memiliki fungsi utama kegiatan ekonomi, lingkungan hidup, sosial dan budaya dengan karakteristik perkotaan [16].

5. Perencanaan

- Proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. proses mengarahkan kegiatan manusia dalam pemanfaatan sumber daya yang mengacu pada masa yang akan datang [15].
- Suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu; Cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif; Penentuan tujuan yang akan dicapai atau yang akan dilakukan, bagaimana, bilamana dan oleh siapa [18].

6. Perencanaan Kota

- Perencanaan kota (*city/town planning*) atau perencanaan perkotaan (*urban planning*) merupakan salah satu jenis aktivitas perencanaan yang mempunyai hierarki atau skala spasial kota/perkotaan. Dalam hal ini perencanaan kota merupakan cabang dari perencanaan wilayah dan kota

(*regional and city planning*) [15].

- Perencanaan kota merupakan aktivitas yang benar-benar direncanakan dengan matang yang biasanya ditangani oleh orang-orang yang terlatih secara profesional sebagai perencana [19].

2.1.2 Karakteristik Kota dan Kawasan Perkotaan

Setiap unsur kota jika ditinjau satu persatu secara terpisah, maka kota nampak tidak rumit. Namun pada kenyataannya kota memiliki berbagai komponen dan unsur, mulai dari komponen yang terlihat nyata secara fisik seperti perumahan dan prasarana umum, hingga komponen yang secara fisik tidak dapat terlihat yaitu berupa kekuatan politik dan hukum yang mengarahkan kegiatan kota. Di samping itu, berbagai interaksi antar unsur yang bermacam-macam memiliki tingkat kepentingan yang sama dengan unsur itu sendiri. Pada saat unsur-unsur dan keterkaitan antar unsur dipandang secara bersama-sama, kota-kota yang cukup besar akan terlihat sebagai organisme yang paling rumit yang merupakan hasil karya manusia. Dalam kaitan ini perencanaan kota secara komprehensif diupayakan untuk memahami kerumitan tersebut, sehingga memungkinkan bagi perencana memberikan rekomendasi yang bersifat membangun melalui berbagai intervensi yang mengarahkan perkembangan kota [20].

A. Karakteristik Kota

Pembahasan mengenai karakteristik kota dan/atau kawasan perkotaan pada bagian ini sebagian besar didasarkan pada tinjauan yang telah dilakukan yang menguraikan kota secara fisik, sosial, ekonomi [20].

1. Kota Ditinjau dari Aspek Fisik

Pengertian kota dan perkotaan menurut aspek fisik adalah kawasan terbangun (*built up area*) yang terletak saling berdekatan/terkonsentrasi, yang meluas dari pusatnya hingga ke wilayah pinggiran, atau wilayah geografis yang didominasi oleh struktur binaan (*man made structure*). Dalam pengertian ini kota terdiri dari: (a) bangunan-bangunan dan kegiatan-kegiatan yang berada di permukaan tanah, atau dekat dengan muka tanah; (b) Instalasi-instalasi di bawah permukaan tanah; dan (c) Kegiatan-kegiatan di dalam ruangan kosong di angkasa[15].

Unsur-unsur yang mempengaruhi karakteristik fisik kota adalah sebagai

berikut [20],

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| a. Topografi tapak | d. Ruang terbuka |
| b. Bangunan | e. Kepadatan perkotaan |
| c. Struktur (bukan bangunan) | f. Iklim |
| - Jalur-jalur transportasi | g. Vegetasi |
| - Jaringan utilitas | h. Kualitas estetika |

2. Kota Ditinjau dari Aspek Sosial

Pengertian kota dan perkotaan menurut aspek sosial merupakan konsentrasi penduduk yang membentuk suatu komunitas yang pada awalnya bertujuan untuk meningkatkan produktivitas melalui konsentrasi dan spesialisasi tenaga kerja dan meningkatkan adanya diversitas intelektual, kebudayaan dan kegiatan rekreatif di kota-kota. Aspek yang berpengaruh terhadap hal ini adalah (a) besaran dan komposisi penduduk dan (b) ke ruangan [15].

- a. Kota dipengaruhi oleh besaran jumlah penduduk

Komposisi penduduk menjadi dasar perhitungan kebutuhan akan kegiatan dan pelayanan kota tertentu. Jumlah dan besaran fasilitas yang harus disediakan seperti petugas keamanan, pemadam kebakaran, dan bentuk pelayanan lain yang diperlukan untuk melindungi penduduk dan harta bendanya dikaitkan dengan jumlah dan jenis penduduk

- b. Kota dipadang dari sudut ke ruangan

Pada sekeliling pusat pemerintahan dan pusat komersial biasanya terdapat sederetan kawasan tidak terawat yang merupakan tempat tinggal sebagian besar penduduk tidak mampu, berpenghasilan rendah, golongan usia lanjut, dan kelompok yang tergolong minoritas. Penduduk permukiman liar tersebut dijumpai di tanah-tanah terbuka di pinggiran kota dan di semua bagian dalam kota yang memungkinkan penggunaan tanah secara tidak resmi seperti sepanjang tepian jalan raya, jalur kereta api, jalur utilitas, lereng bukit terjal, daerah industri, dan tempat-tempat yang belum terbangun. Seperti apapun bentuk pengaturan penduduk dan guna lahan ke dalam ruang wilayah yang tepat, identifikasi dan analisis implikasi sosio-ekonomi pengaturan tersebut merupakan bagian yang penting bagi keberhasilan perencanaan kota.

3. Kota Ditinjau dari Aspek Ekonomi

Kota memiliki fungsi sebagai penghasil produksi barang dan jasa, untuk mendukung kehidupan penduduknya dan untuk keberlangsungan kota itu sendiri. Ekonomi perkotaan yang sehat mampu menyediakan berbagai kebutuhan untuk keperluan pertumbuhan perkotaan, terutama untuk menerima perkembangan baru yang disebabkan oleh kemajuan di bidang teknologi dan perubahan keadaan.

Sebuah kota jika dilihat dari berbagai tinjauan aspek di atas dapat disimpulkan bahwa kota memiliki karakteristik yaitu jumlah penduduk yang besar, pemusatan kegiatan non-pertanian, merupakan pusat kegiatan ekonomi (industri dan perdagangan), konsentrasi kawasan terbangun (*built up area*), masyarakat yang heterogen, memiliki pola hidup yang khusus, pusat penyebaran pengetahuan dan memiliki gaya hidup kota, terdapat berbagai lembaga sosial, ekonomi, dan politik; terdapat berbagai fasilitas umum dan fasilitas sosial, struktur dicirikan dengan adanya ruang dan jalan kota, merupakan pusat jasa pelayanan bagi lingkungan perumahan, adanya sejumlah fungsi kegiatan kota, minimal seperti pasar, dan sebagainya [15].

B. Karakteristik Kawasan Perkotaan

Kawasan perkotaan merupakan sebuah konsentrasi atau daerah yang dapat terlihat dari pendekatan jumlah fasilitas dengan mengukur seberapa banyak jenis fasilitas yang tersedia untuk menjalankan fungsi perkotaan. Fasilitas tersebut meliputi: pusat perdagangan, pusat pelayanan jasa, tersedianya prasarana kota (jalan yang baik, jaringan listrik, telepon, air minum, pelayanan sampah, sistem drainase, taman kota dan pasar), fasilitas sosial (fasilitas pendidikan, kesehatan, gedung pertemuan), pusat pemerintahan, pusat komunikasi, dan pangkalan transport, dan lokasi pemukiman tertata [21].

Kawasan perkotaan dapat dilihat dari standar pelayanan perkotaan (SPP) dengan didasarkan pada status kawasan perkotaan dan ukuran kawasan perkotaan.

1. Status Kawasan Perkotaan

Adapun penentuan status kawasan perkotaan didasari oleh wilayah administratif yaitu wilayah yang batas-batasnya ditentukan berdasarkan kepentingan administrasi pemerintahan atau politik, seperti: propinsi,

kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan [15]. Ditinjau berdasarkan statusnya, kawasan perkotaan di Indonesia sebagai berikut [22];

- a. Kota Otonom
- b. Ibukota Kabupaten
- c. Ibukota Provinsi.

2. Ukuran Kawasan Perkotaan

Klasifikasi ukuran kawasan perkotaan dikelompokkan berdasarkan jumlah penduduk. Adapun klasifikasi ukuran kawasan perkotaan sebagai berikut [22];

- a. Kawasan Perkotaan Kecil, yaitu Kawasan Perkotaan dengan jumlah penduduk yang dilayani sebesar 10.000 hingga 100.000 jiwa.
- b. Kawasan Perkotaan Sedang, yaitu Kawasan Perkotaan dengan jumlah penduduk yang dilayani sebesar 100.001 hingga 500.000 jiwa.
- c. Kawasan Perkotaan Besar, yaitu Kawasan Perkotaan dengan jumlah penduduk yang dilayani 500.000 – 1.000.000 jiwa.
- d. Kawasan Perkotaan Metropolitan, yaitu Kawasan Perkotaan dengan jumlah penduduk yang dilayani lebih besar dari 1.000.000 jiwa.

2.1.3 Fungsi Kawasan Perkotaan

Kawasan perkotaan dapat dibedakan berdasarkan fungsi atau kegiatan utama yang bergerak di kawasan tersebut serta dapat juga didasarkan kepada karakteristik dari kota itu sendiri. Pelayanan perkotaan dikelompokkan sesuai dengan fungsi kawasan perkotaan yang terdiri atas; tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi [22].

Terdapat berbagai jenis pelayanan pada setiap fungsi dari kawasan perkotaan, antara lain;

1. Tempat Permukiman Perkotaan
 - Perumahan
 - Air limbah
 - Air minum
 - Energi
 - Drainase
 - Komunikasi dan informasi
 - Prasarana jalan lingkungan
 - Ruang terbuka hijau
 - Persampahan

2. Pemusatan dan Distribusi Pelayanan Jasa Pemerintahan
 - Perkantoran pemerintah
 - Pelayanan administrasi kependudukan dan administrasi pertanahan
 - Pelayanan ketenagakerjaan
 - Pelayanan perizinan
 - Sarana pengendalian lingkungan hidup
 - Penanggulangan bencana, dan
 - Ketentraman dan ketertiban
3. Pelayanan Sosial
 - Pendidikan
 - Kesehatan
 - Pusat pelayanan sosial
 - Rekreasi dan olahraga
 - Sarana peribadatan
 - Pemakaman
4. Kegiatan Ekonomi
 - Pusat perdagangan dan jasa
 - Pergudangan
 - Ruang untuk sektor informal dan usaha kecil dan menengah
 - Jasa keuangan
 - Pusat informasi daerah
 - Penginapan, dan
 - Pelayanan transportasi

Adapun fasilitas dari kelompok fungsi kawasan perkotaan tersebut dijabarkan berdasarkan pada bagian perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana lingkungan, antara lain [23];

Tabel 2. 2 Kebutuhan Saranan dan Prasarana Lingkungan Perkotaan

No.	Sarana dan Prasarana	Jenis Fasilitas
1.	Pendidikan	SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA
2.	Kesehatan	Praktek Dokter, Puskesmas Pembantu, Puskesmas + Rawat inap, Rumah Sakit Bersalin, Apotek
3.	Perekonomian	Pusat perbelanjaan dan niaga (Pertokoan, pasar, bank, kantor, industry kecil)
4.	Pemerintahan dan Pelayanan Umum	Kantor Pemerintah, Kantor Polisi, Kantor Pos, Kantor Telfon, Pemadam Kebakaran
5.	Peribadatan	Musholla, Masjid, Masjid Besar, Gereja, Pura,

No.	Sarana dan Prasarana	Jenis Fasilitas
		Wihara
6.	Olahraga dan Daerah Terbuka	Taman dan lapangan terbuka, Kuburan
7.	Kebudayaan dan Rekreasi	Gedung serba guna, Bioskop
8.	Transportasi	Terminal

Sumber : SNI 03 – 1733 – 2004

2.2 Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau atau yang berikutnya disingkat RTH berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja di tanam. Penyediaan dan pemanfaatan RTH terdiri atas RTH Publik dan RTH privat dengan proporsi RTH minimal 30% persen dari luas wilayah kota yang dibagi menjadi 20% RTH Publik dan 10% RTH privat. Selain itu, RTH juga sebagai infrastruktur hijau perkotaan yang berarti RTH menjadi bagian dari ruang-ruang terbuka (*open spaces*) suatu wilayah perkotaan. Ruang terbuka di kawasan perkotaan ini di isi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi guna mendukung manfaat langsung dan/atau tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH, adapun manfaat pada kota tersebut yaitu keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah perkotaan tersebut [24].

2.2.1 Tujuan dan Fungsi Ruang Terbuka Hijau

Tujuan penyelenggaraan RTH berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.5 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaat Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan adalah [7] :

1. Menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air;
2. Menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat;
3. Meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.

Penyediaan dan pemanfaat RTH dalam penataan ruang berfungsi untuk menjamin tersedianya ruang yang menjadi kebutuhan bagi lingkungan dan masyarakat disekitarnya. Adapun berbagai contoh pemanfaatan RTH bagi lingkungan dan masyarakat, antara lain sebagai berikut [7];

1. kawasan konservasi untuk kelestarian hidrologis;
2. kawasan pengendalian air larian dengan menyediakan kolam retensi;
3. area pengembangan keanekaragaman hayati;
4. area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di kawasan perkotaan;
5. tempat rekreasi dan olahraga masyarakat;
6. tempat pemakaman umum;
7. pembatas perkembangan kota ke arah yang tidak diharapkan;
8. pengamanan sumber daya baik alam, buatan maupun historis;
9. penyediaan RTH yang bersifat privat, melalui pembatasan kepadatan serta kriteria pemanfaatannya;
10. area mitigasi/evakuasi bencana; dan
11. ruang penempatan pertandaan (signage) sesuai dengan peraturan perundangan dan tidak mengganggu fungsi utama RTH tersebut.

2.2.2 Karakteristik Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau (RTH) memiliki bentuk dan jenis yang beragam, dimana setiap jenisnya memiliki karakteristik dan tujuan kegunaannya masing-masing. Penyediaan RTH tersebut dikelompokkan kedalam empat (4) karakteristik yaitu: berdasarkan fisik, fungsi, struktur, dan kepemilikan [7].

	Fisik	Fungsi	Struktur	Kepemilikan
Ruang Terbuka Hijau (RTH)	RTH Alami	Ekologis Sosial Budaya	Pola Ekologis	RTH Publik
	RTH Non Alami	Estetika Ekonomi	Pola Planologis	RTH Privat

Gambar 2. 1 Karakteristik Ruang Terbuka Hijau

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 5/PRT/M/2008

1. **Berdasarkan fisiknya**, RTH terbagi dalam dua jenis yaitu RTH alami dan non alami/binaan. RTH alami merupakan RTH yang proses penyediaannya terjadi secara alami seperti habitat liar alami, kawasan lindung, dan taman nasional. Sedangkan RTH non alami/binaan merupakan RTH yang proses penyediaannya secara buatan atau disengaja seperti taman, lapangan olahraga, pemakaman, atau jalur-jalur hijau jalan.
2. **Berdasarkan fungsinya**, RTH terbagi dalam empat jenis yaitu: fungsi ekologis, sosial budaya, estetika, dan ekonomi. RTH ekologis merupakan fungsi utama (intrinsik). Adapun peran RTH fungsi ekologis sebagai berikut;
 - memberi jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara (paru-paru kota);
 - pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar;
 - sebagai peneduh;
 - produsen oksigen;
 - penyerap air hujan;
 - penyedia habitat satwa;
 - penyerap polutan media udara, air dan tanah, serta;
 - penahan angin.

Sedangkan RTH sosial budaya, estetika, dan ekonomi berperan sebagai fungsi tambahan (ekstrinsik). Adapun fungsi RTH sebagai berikut ;

a. Fungsi sosial dan budaya:

- menggambarkan ekspresi budaya lokal;
- merupakan media komunikasi warga kota;
- tempat rekreasi;
- wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam mempelajari
- alam.

b. Fungsi ekonomi:

- sumber produk yang bisa dijual, seperti tanaman bunga, buah, daun, sayur
- mayur;

- bisa menjadi bagian dari usaha pertanian, perkebunan, kehutanan dan lainlain.

c. Fungsi estetika:

- meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik dari skala mikro: halaman rumah, lingkungan permukiman, maupun makro: lansekap kota secara keseluruhan;
- menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota;
- pembentuk faktor keindahan arsitektural;
- menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.

Empat fungsi utama dalam suatu wilayah perkotaan dapat dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, dan keberlanjutan kota seperti perlindungan tata air, keseimbangan ekologi dan konservasi hayati. Adapun manfaat RTH berdasarkan fungsinya dibagi atas:

- a. Manfaat langsung (dalam pengertian cepat dan bersifat *tangible*), yaitu membentuk keindahan dan kenyamanan (teduh, segar, sejuk) dan mendapatkan bahan-bahan untuk dijual (kayu, daun, bunga, buah);
- b. Manfaat tidak langsung (berjangka panjang dan bersifat *intangible*), yaitu pembersih udara yang sangat efektif, pemeliharaan akan kelangsungan persediaan air tanah, pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi flora dan fauna yang ada (konservasi hayati atau keanekaragaman hayati).

3. **Berdasarkan struktur ruang**, RTH terbagi dalam dua jenis yaitu: pola ekologis dan planologis. RTH pola ekologis berbentuk mengelompok, memanjang, dan tersebar. Sedangkan RTH pola planologis mengikuti hirarki dan struktur ruang perkotaan.
4. **Berdasarkan kepemilikannya**, dari segi kepemilikan RTH dibedakan ke dalam RTH Publik dan RTH privat dengan memiliki beberapa fungsi utama seperti fungsi ekologis serta fungsi tambahan, yaitu sosial budaya, ekonomi, estetika/arsitektural. Khusus untuk RTH dengan fungsi sosial seperti tempat istirahat, sarana olahraga dan atau area bermain, maka RTH ini harus memiliki aksesibilitas yang baik untuk semua orang, termasuk aksesibilitas

bagi penyandang cacat. Berikut merupakan pembagian jenis-jenis RTH Publik dan RTH Privat dilihat dari klasifikasi dan tipologinya :

Tabel 2. 3 Klasifikasi dan Tipologi RTH Berdasarkan Kepemilikan

No.	Klasifikasi Ruang Terbuka Hijau	RTH Publik	RTH Privat
1.	RTH Pekarangan		
	a. Pekarangan rumah tinggal		√
	b. Halaman perkotaan, pertokoan, dan tempat usaha		√
	c. Taman atap bangunan		√
2.	RTH Taman dan Hutan Kota		
	a. Taman RT	√	√
	b. Taman RW	√	√
	c. Taman Kelurahan	√	√
	d. Taman Kecamatan	√	√
	e. Taman Kota	√	
	f. Hutan Kota	√	
	g. Sabuk Hijau (Green Belt)	√	
3.	RTH Jalur Hijau Jalan		
	a. Pulau jalan dan median jalan	√	√
	b. Jalur pejalan kaki	√	√
	c. Ruang dibawah jalan layang	√	
4.	RTH Fungsi Tertentu		
	a. RTH sempadan rel kereta api	√	
	b. Jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi	√	
	c. RTH sependan sungai	√	
	d. RTH pengamanan sumber air baku / mata air	√	
	e. Pemakaman	√	

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 5/PRT/M/2008

2.3 Ruang Terbuka Hijau Publik Kawasan Perkotaan

2.3.1 Karakteristik RTH Publik Pada Tipologi Kawasan Perkotaan

Karakteristik Ruang Terbuka Hijau (RTH) disesuaikan dengan tipologi kawasannya. Adapun tipologi kawasan perkotaan pada Kabupaten Kubu Raya berupa kawasan perkotaan dengan berpenduduk jarang sampai dengan sedang dan padat. Berikut ini tabel arahan karakteristik RTH di perkotaan untuk berbagai tipologi kawasan perkotaan [7]:

Tabel 2. 4 Fungsi dan Penerapan RTH Pada Tipologi Kawasan Perkotaan

Tipologi Kawasan Perkotaan	Karakteristik RTH	
	Fungsi Utama	Penerapan Kebutuhan RTH
Berpenduduk jarang s.d sedang	- Dasar perencanaan kawasan	- Berdasarkan fungsi tertentu
	- Sosial	- Berdasarkan jumlah penduduk
Berpenduduk padat	- Ekologis	- Berdasarkan fungsi tertentu
	- Sosial	- Berdasarkan jumlah penduduk
	- Hidrologi	

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 5/PRT/M/2008

Adapun penentuan tingkat kepadatan penduduk Indonesia di atur dalam SNI 03-1733-2004 tentang tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan. Berikut merupakan klasifikasi kepadatan penduduk menurut SNI [23];

Tabel 2. 5 Tingkat Kepadatan Penduduk

Tingkat Kepadatan	Klasifikasi Kawasan	
	Kepadatan Penduduk	Reduksi Terhadap Kebutuhan Lahan
Rendah	< 150 jiwa/ha	-
Sedang	151 – 200 jiwa/ha	-
Tinggi	201 – 400 jiwa/ha	15% (maksimal)
Sangat Padat	> 400 jiwa/ha	30% (maksimal)

Sumber : SNI 03 – 1733 – 2004

-

Selain itu terdapat juga kaitan antara tata ruang dan ruang terbuka hijau berdasarkan hierarki kawasan, antara lain [24];

Tabel 2. 6 Kaitan Tata Ruang dan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Hirarki Kawasan

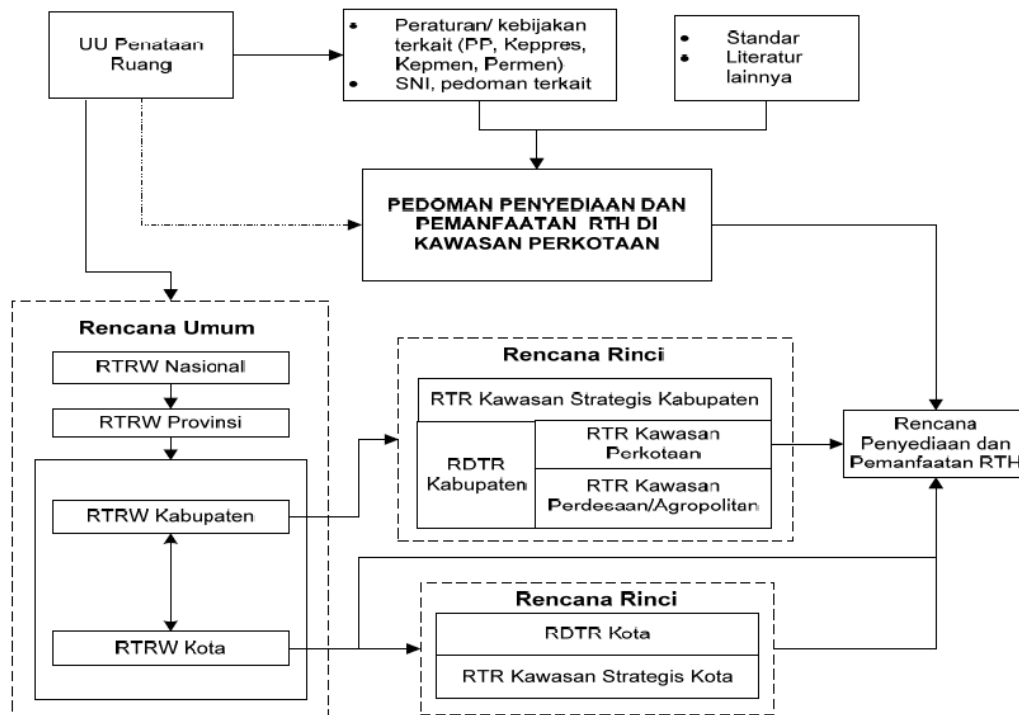
Hierarki Kawasan	Fungsi Pelayanan	Fasilitas Umum & Sosial	Ruang Terbuka Hijau
Pusat Kota	<ul style="list-style-type: none"> - Melayani fungsi-fungsi regional kawasan. - Pemenuhan kebutuhan insidental seperti RS besar, Pendidikan tinggi, jasa perbankan, dan koneksi terhadap jaringan transportasi regional/antar. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pusat perdagangan dan bisnis - Perkantoran - Perdagangan dan jasa skala besar - Rumah sakit pusat sarana Pendidikan lanjutan - Sarana hiburan dan rekreasi kota 	<ul style="list-style-type: none"> - Taman kota, green belt, hutan kota, taman botani dll - Fasilitas olah raga : stadion sepakbola skala regional/nasional - Jalur-jalur hijau pada koridor jalan utama - Danau dan area retensi pengendali banjir.
Sub-Pusat (Kecamatan)	<ul style="list-style-type: none"> - Melayani kegiatan ekonomi-sosial di tingkat kecamatan - Pemenuhan kebutuhan bulanan (pusat perbelanjaan, pasar tradisional dan jasa perbankan) 	<ul style="list-style-type: none"> - SMA, sekolah tinggi, perpustakaan wilayah - Pasar kecamatan - Fasilitas perbankan, pos dan giro - Sarana rekreasi (bioskop, arena hiburan dll) 	<ul style="list-style-type: none"> - Taman kecamatan, jogging track. - Fasilitas olahraga, stadion mini, kolam renang - Sempadan sungai, situ, dan kolam-kolam retensi - Urban agriculture, kebon bibit, taman bunga dl
Lokal (Kelurahan)	<ul style="list-style-type: none"> - Pusat kegiatan lokal - Pemenuhan kebutuhan mingguan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan menengah SMP, sekolah kejuruan, kursus ketrampilan - Sarana ibadah : 	<ul style="list-style-type: none"> - Taman kelurahan, taman Bunga - Sarana olahraga lapangan bola, lapangan basket

Hierarki Kawasan	Fungsi Pelayanan	Fasilitas Umum & Sosial	Ruang Terbuka Hijau
	(belanja, bank, rekreasi) - Kawasan hunian (dormitory area)	Masjid besar, gereja	- TPU - Taman bermain (playground)
Sub-Lokal	- Pemenuhan kebutuhan sehari hari (Pendidikan dasar, ibadah, interaksi social, belanja harian dll)	- Taman kanak-kanak, sekolah dasar - Sarana ibadah - Pertokoan kecil, warung serba ada. Sarana transportasi ojek, becak dll	- Lapangan olahraga (volley, tennis, badminton dll) - Taman-taman privat

Sumber : Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum, 2006

2.3.2 Penyediaan RTH Publik di Kawasan Perkotaan

Rencana penyediaan dan pemanfaatan RTH selain dimuat dalam RTRW Kota, RDTR Kota, atau RTR Kawasan Strategis Kota, juga dimuat dalam RTR Kawasan Perkotaan yang merupakan rencana rinci tata ruang wilayah Kabupaten [7]. Adapun kedudukan penyediaan dan pemanfaatan RTH dalam rencana tata ruang wilayah sebagai berikut;



Gambar 2. 2 Kedudukan Rencana Penyediaan dan Pemanfaatan RTH dalam RTR Kawasan Perkotaan

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 5/PRT/M/2008

Kedalaman rencana penyediaan dan pemanfaatan RTH pada masing-masing rencana tata ruang dapat dilihat pada **tabel 2.7** sebagai berikut [7];

Tabel 2. 7 Kedalaman Rencana Penyediaan dan Pemanfaatan RTH

Jenis Rencana Tata Ruang	Kedalaman Muatan
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (Rencana Umum)	<ul style="list-style-type: none"> • Luas minimum yang harus dipenuhi; • Penetapan jenis dan lokasi RTH yang akan disediakan; • Tahap-tahap implementasi penyediaan RTH; • Ketentuan pemanfaatan RTH secara umum;

Jenis Rencana Tata Ruang	Kedalaman Muatan
RDTRK / RTR Kawasan Strategis Kota / RTR Kawasan Perkotaan (Rencana Rinci)	<ul style="list-style-type: none"> • Tipologi masing-masing RTH, alternatif vegetasi pengisi ruang khususnya arahan vegetasi dalam kelompok-kelompok besar, arahan elemen pelengkap pada RTH, hingga konsep-konsep rencana RTH sebagai arahan untuk pengembangan disain selanjutnya. • Rencana penyediaan RTH yang dirinci berdasarkan jenis/tipologi RTH, lokasi, dan luas dengan skala yang lebih detail/besar; • Alternatif vegetasi pengisi ruang khususnya arahan vegetasi dalam kelompok-kelompok besar; • Arahan elemen pelengkap pada RTH; • Konsep-konsep rencana RTH sebagai arahan untuk pengembangan disain selanjutnya; • Indikasi program mewujudkan penyediaan RTH pada masing-masing kawasan/bagian wilayah kota; • Ketentuan tentang peraturan zonasi.

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 5/PRT/M/2008

Penyediaan RTH Publik pada penelitian ini didasarkan pada luas wilayah dan jumlah penduduk di Ibukota Kabupaten Kubu Raya. Adapun penjabaran lebih jelas sebagai berikut [7];

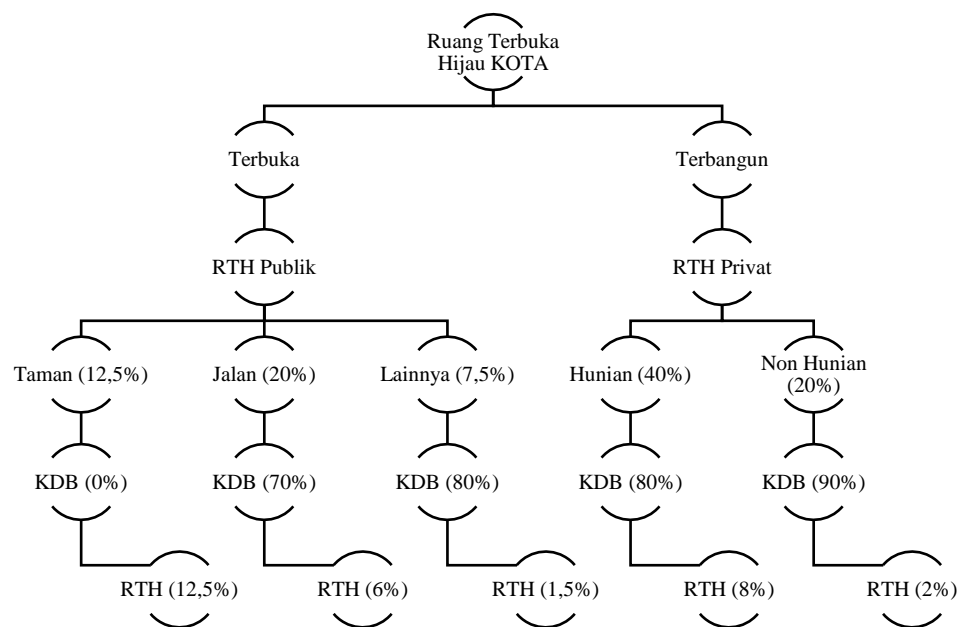
1. Penyediaan RTH Berdasarkan Luas Wilayah

Penyediaan RTH berdasarkan luas wilayah di perkotaan adalah sebagai berikut :

- a. Ruang terbuka hijau di perkotaan terdiri dari RTH Publik dan RTH privat;
- b. Proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% terdiri dari ruang terbuka hijau privat;

- c. Apabila luas RTH baik publik maupun privat di kota yang bersangkutan telah memiliki total luas lebih besar dari peraturan atau perundangan yang berlaku, maka proporsi tersebut harus tetap dipertahankan keberadaannya.

Proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan mikroklimat, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota. Target luas sebesar 30% dari luas wilayah kota dapat dicapai secara bertahap melalui pengalokasian lahan perkotaan secara tipikal seperti pada gambar dibawah ini.



Gambar 2.3 Proporsi RTH Kawasan Perkotaan

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 5/PRT/M/2008

Adapun penjabaran pada **Gambar 2.3** sebagai berikut;

- Ruang Kota terdiri dari ruang terbangun dan ruang terbuka.
- Ruang terbangun terdiri dari hunian adalah 40% dengan KDB adalah 80% dan non hunian adalah 20% dengan KDB 90%. Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk hunian adalah 8% dan RTH non hunian 2% sehingga RTH privat adalah 10%.

- Ruang terbuka terdiri dari taman adalah 12,5% dengan KDB 0%, jalan adalah 20% dan lainnya 7,5% dengan KDB adalah 80%. Ruang terbuka hijau untuk taman 12,5%, untuk jalan adalah 6% dan ruang terbuka hijau untuk lainnya 1,5% sehingga RTH Publik adalah 20%. Maka standard Ruang Terbuka Hijau (RTH) kawasan perkotaan adalah 30%.

2. Penyediaan RTH Berdasarkan Jumlah Penduduk

Penentuan luas RTH berdasarkan jumlah penduduk, dilakukan dengan mengalikan antara jumlah penduduk yang dilayani dengan standar luas RTH per kapita sesuai peraturan yang berlaku.

Tabel 2. 8 Penyediaan RTH Berdasarkan Jumlah Penduduk

No.	Unit Lingkungan	Tipe RTH	Luas minimal / unit (m2)	Lokasi
1.	250 jiwa	Taman RT	250	Di tengah lingkungan RT
2.	2500 jiwa	Taman RW	1.250	Di pusat kegiatan RW
3.	30.000 jiwa	Taman Kelurahan	9.000	Dikelompokan dengan sekolah / pusat kelurahan
4.	120.000 jiwa	Taman Kecamatan	24.000	Dikelompokan dengan sekolah / pusat kecamatan.
		Pemukaman	Disesuaikan	tersebar
5.	480.000	Taman Kota	144.000	Di pusat wilayah / kota
		Hutan Kota	Disesuaikan	Di dalam / Kawasan pinggiran
		Untuk fungsi-fungsi tertentu	Disesuaikan	Disesuaikan dengan kebutuhan.

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 5/PRT/M/2008

2.3.3 Arahkan Penyediaan dan Pemanfaatan RTH Publik di Kawasan Perkotaan

Kepemilikan pada tipologi ruang terbuka hijau, terdapat dua jenis ruang terbuka hijau yaitu ruang terbuka hijau publik dan privat. Adapun arahan penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau publik antara lain [7];

1. Pada Lingkungan / Permukiman

Klasifikasi dan tipologi RTH berdasarkan unit lingkungannya terdiri dari;

a. RTH Taman Rukun Tetangga

Taman Rukun Tetangga (RT) dapat dimanfaatkan penduduk sebagai tempat melakukan berbagai kegiatan sosial di lingkungan RT tersebut. Untuk mendukung aktivitas penduduk di lingkungan tersebut, fasilitas yang harus disediakan minimal bangku taman dan fasilitas mainan anak-anak. Selain sebagai tempat untuk melakukan aktivitas sosial, RTH Taman Rukun Tetangga dapat pula dimanfaatkan sebagai suatu community garden dengan menanam tanaman obat keluarga/apotik hidup, sayur, dan buah-buahan yang dapat dimanfaatkan oleh warga.

b. RTH Taman Rukun Warga

RTH Rukun Warga (RW) dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan remaja, kegiatan olahraga masyarakat, serta kegiatan sosial lainnya di lingkungan RW tersebut. Fasilitas yang disediakan berupa lapangan untuk berbagai kegiatan, baik olahraga maupun aktivitas lainnya, beberapa unit bangku taman yang dipasang secara berkelompok sebagai sarana berkomunikasi dan bersosialisasi antar warga, dan beberapa jenis bangunan permainan anak yang tahan dan aman untuk dipakai pula oleh anak remaja.

c. RTH Kelurahan

RTH kelurahan dapat disediakan dalam bentuk taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan. Luas taman ini minimal 0,30 m² per penduduk kelurahan, dengan luas minimal taman 9.000 m². Lokasi taman berada pada wilayah kelurahan yang bersangkutan. Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) minimal seluas 80% - 90% dari luas taman, sisanya dapat berupa pelataran yang diperkeras sebagai tempat melakukan berbagai aktivitas.

Taman ini dapat berupa taman aktif, dengan fasilitas utama lapangan olahraga (serbaguna), dengan jalur trek lari di seputarnya, atau dapat berupa taman pasif, dimana aktivitas utamanya adalah kegiatan yang lebih bersifat pasif, misalnya duduk atau bersantai, sehingga lebih didominasi

oleh ruang hijau dengan pohon-pohon tahunan.

d. RTH Kecamatan

RTH kecamatan dapat disediakan dalam bentuk taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan. Luas taman ini minimal 0,2 m² per penduduk kecamatan, dengan luas taman minimal 24.000 m². Lokasi taman berada pada wilayah kecamatan yang bersangkutan. Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) minimal seluas 80% - 90% dari luas taman, sisanya dapat berupa pelataran yang diperkeras sebagai tempat melakukan berbagai aktivitas. Pada taman ini selain ditanami dengan berbagai tanaman sesuai keperluan, juga terdapat minimal 50 (lima puluh) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang untuk taman aktif dan minimal 100 (seratus) pohon tahunan dari jenis pohon kecil atau sedang untuk jenis taman pasif.

RTH kecamatan dapat dimanfaatkan oleh penduduk untuk melakukan berbagai aktivitas di dalam satu kecamatan. Taman ini dapat berupa taman aktif dengan fasilitas utama lapangan olahraga, dengan jalur trek lari di seputarnya, atau dapat berupa taman pasif untuk kegiatan yang lebih bersifat pasif, sehingga lebih didominasi oleh ruang hijau. Kelengkapan taman ini adalah sebagai berikut:

2. Kota / Perkotaan

Klasifikasi dan tipologi RTH berdasarkan unit kota/perkotaan terdiri dari;

a. RTH Taman Kota

RTH Taman kota adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota. Taman ini melayani minimal 480.000 penduduk dengan standar minimal 0,3 m² per penduduk kota, dengan luas taman minimal 144.000 m². Taman ini dapat berbentuk sebagai RTH (lapangan hijau), yang dilengkapi dengan fasilitas rekreasi dan olah raga, dan kompleks olah raga dengan minimal RTH 80% - 90%. Semua fasilitas tersebut terbuka untuk umum.

b. Hutan Kota

Tujuan penyelenggaraan hutan kota adalah sebagai peyangga lingkungan kota yang berfungsi untuk:

- Memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika;
- Meresapkan air;
- Menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota; dan
- Mendukung pelestarian dan perlindungan keanekaragaman hayati Indonesia.

Hutan kota dapat berbentuk:

- Bergerombol atau menumpuk: hutan kota dengan komunitas vegetasi terkonsentrasi pada satu areal, dengan jumlah vegetasi minimal 100 pohon dengan jarak tanam rapat tidak beraturan;
- Menyebar: hutan kota yang tidak mempunyai pola bentuk tertentu, dengan luas minimal 2500 m. Komunitas vegetasi tumbuh menyebar terpencar-pencar dalam bentuk rumpun atau gerombol-gerombol kecil;
- Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) seluas 90% - 100% dari luas hutan kota;
- Berbentuk jalur: hutan kota pada lahan-lahan berbentuk jalur mengikuti bentukan sungai, jalan, pantai, saluran dan lain sebagainya. Lebar minimal hutan kota berbentuk jalur adalah 30 m.

c. Sabuk Hijau

Sabuk hijau merupakan RTH yang berfungsi sebagai daerah penyangga dan untuk membatasi perkembangan suatu penggunaan lahan (batas kota, pemisah kawasan, dan lain-lain) atau membatasi aktivitas satu dengan aktivitas lainnya agar tidak saling mengganggu, serta pengamanan dari faktor lingkungan sekitarnya.

Sabuk hijau dapat berbentuk:

- RTH yang memanjang mengikuti batas-batas area atau penggunaan lahan tertentu, dipenuhi pepohonan, sehingga berperan sebagai pembatas atau pemisah;
- Hutan kota;
- Kebun campuran, perkebunan, pesawahan, yang telah ada sebelumnya (eksisting) dan melalui peraturan yang berketetapan hukum, dipertahankan keberadaannya.

d. RTH Jalur Hijau Jalan

Untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20–30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan kelas jalan. Untuk menentukan pemilihan jenis tanaman, perlu memperhatikan 2 (dua) hal, yaitu fungsi tanaman dan persyaratan penempatannya. Disarankan agar dipilih jenis tanaman khas daerah setempat, yang disukai oleh burung-burung, serta tingkat evapotranspirasi rendah.

e. RTH Ruang Pejalan Kaki

Ruang pejalan kaki adalah ruang yang disediakan bagi pejalan kaki pada kiri-kanan jalan atau di dalam taman.

f. RTH Fungsi Tertentu

- RTH Sempadan Sungai

RTH sempadan sungai adalah jalur hijau yang terletak di bagian kiri dan kanan sungai yang memiliki fungsi utama untuk melindungi sungai tersebut dari berbagai gangguan yang dapat merusak kondisi sungai dan kelestariannya.

Pemanfaatan RTH daerah sempadan sungai dilakukan untuk kawasan konservasi, perlindungan tepi kiri-kanan bantaran sungai yang rawan erosi, pelestarian, peningkatan fungsi sungai, mencegah okupasi penduduk yang mudah menyebabkan erosi, dan pengendalian daya rusak sungai melalui kegiatan penatagunaan, perizinan, dan pemantauan. Penatagunaan daerah sempadan sungai dilakukan dengan penetapan zona-zona yang berfungsi sebagai fungsi lindung dan budi daya. Pada zona sungai yang berfungsi lindung menjadi kawasan lindung, pada zona sungai danau, waduk yang berfungsi budi daya dapat dibudidayakan kecuali pemanfaatan tanggul hanya untuk jalan.

- RTH Sempadan Pantai

RTH sempadan pantai memiliki fungsi utama sebagai pembatas pertumbuhan permukiman atau aktivitas lainnya agar tidak mengganggu kelestarian pantai. RTH sempadan pantai merupakan area pengaman pantai dari kerusakan atau bencana yang ditimbulkan oleh gelombang laut seperti intrusi air laut, erosi, abrasi, tiupan angin kencang dan gelombang tsunami. Lebar RTH sempadan pantai minimal 100 m dari

batas air pasang tertinggi ke arah darat. Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) seluas 90% - 100%.

- RTH Pemakaman

Penyediaan ruang terbuka hijau pada areal pemakaman disamping memiliki fungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah juga memiliki fungsi ekologis yaitu sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.

2.4 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 9 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Analisis	Variabel	Tujuan dan Hasil
1.	Fauzan Maulana Shani (2015) [6]	Kajian Ketersediaan dan Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan di Kota Sukabumi	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis kuantitatif • Analisis interpretasi citra • Analisis ketersediaan RTH berdasarkan UU • Analisis ketersediaan RTH berdasarkan jumlah penduduk • Analisis tetangga terdekat secara kuantitatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Penduduk • Klasifikasi tegakan RTH • Klasifikasi Penggunaan Lahan • Luas RTH • Jenis RTH • Titik lokasi RTH 	<p>Tujuan Mengetahui tingkat ketersediaan, kebutuhan, dan pola persebaran RTH di kawasan perkotaan Kota Sukabumi</p> <p>Hasil Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan ruang terbuka hijau secara keseluruhan berdasarkan luas minimal belum memadai yaitu sebesar 1.673.193,20 m² dengan persentase 5,2% dari luas keseluruhan kawasan perkotaan Kota Sukabumi. Ketersediaan berdasarkan tegakan vegetasi terdapat 20 titik RTH yang tidak sesuai dengan kriteria tegakan vegetasi Kebutuhan RTH yang terdiri dari taman lingkungan, pemakaman, taman kota, hutan kota, dan fungsi tertentu belum memadai, dimana luas ideal RTH sebesar 1.707.048,4 m² dengan ketersediaan 1.628.702 m² sehingga membutuhkan RTH dengan luasan 78.346,32 m². Pola persebaran ruang terbuka hijau cenderung tersebar dimana sebelah utara kawasan perkotaan Kota Sukabumi didominasi oleh RTH taman lingkungan, dan sebelah selatan kawasan perkotaan Kota Sukabumi di dominasi oleh RTH hutan kota dan sempadan sungai.</p>

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Analisis	Variabel	Tujuan dan Hasil
2.	Alvira Neivi Sumarauw (2016) [27]	Analisis Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Bitung	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis Ketersediaan (Analisis Spasial) • Analisis Kebutuhan • Analisis Kecukupan 	<ul style="list-style-type: none"> • Luas Wilayah • Luas Kawasan Hutan • Luas RTH Eksisting • Jenis / Tipe RTH • Jumlah Penduduk 	<p>Tujuan Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketersediaan RTH Publik, kebutuhan RTH Publik dan kecukupan RTH Publik di Kota Bitung.</p> <p>Hasil Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan RTH Publik di Kota Bitung sebesar 53,80 hektar atau sekitar 0,81 persen dari luas wilayah kota. Kebutuhan RTH Publik berdasarkan luas wilayah sebesar 1.329,73 hektar, sedangkan kebutuhan RTH Publik berdasarkan jumlah penduduk Tahun 2018 adalah sebesar 341,19 hektar, Tahun 2023 sebesar 377,68 hektar, Tahun 2028 sebesar 422,30 hektar dan Tahun 2033 sebesar 476,97 hektar. Ketersediaan RTH Publik eksisting belum mencukupi kebutuhan RTH Publik berdasarkan luas wilayah maupun jumlah penduduk.</p>
3.	Renie Gonie (2017) [26]	Analisis Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Kota Sintang	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis penutupan lahan • Analisis serapan CO² • Analisis emisi CO² • Analisis standar kebutuhan RTH • Analisis kesesuaian RUTRK untuk 	<ul style="list-style-type: none"> • Luas wilayah • Jumlah Penduduk • Tipe Vegetasi • Jumlah CO² • Jumlah Konsumsi Bensin • Klasifikasi RTH 	<p>Tujuan Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui Kebutuha, kesesuaian, dan ketercukupan RTH Kota Sintang yang ditinjau dari luas wilayah, jumlah penduduk, dan jumlah CO²</p> <p>Hasil Hasil yang diperoleh bahwa kebutuhan ruang terbuka hijau Kota Sintang masih memenuhi standar dari UU No.26 Tahun 2007 tentang tata ruang.</p>

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Analisis	Variabel	Tujuan dan Hasil
			kawasan hijau terhadap kebutuhan RTH		
4.	Gita (2019) [25]	Evaluasi Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Publik di Perumnas I Kelurahan Sungai Jawi Luar Kecamatan Pontianak Barat	<ul style="list-style-type: none"> • Pendekatan kuantitatif dan kualitatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis RTH • Sebaran RTH • Luas RTH • Vegetasi • Aktivitas masyarakat • Jumlah Penduduk • Luas KDH 	<p>Tujuan Untuk mengevaluasi pemanfaatan RTH di Perumnas 1 Kelurahan Sungai Jawi Luar Kecamatan Pontianak Barat.</p> <p>Hasil RTH di Perumnas 1 digolongkan ke dalam 2 kelas didominasi kelas 3. Sekitar 81% menyatakan bahwa RTH tergolong nyaman. Ketersediaan lapangan olahraga sudah sesuai standar jumlah penduduk. KDH di setiap zona banyak yang belum sesuai dengan arahan peraturan zonasi. Strategi pengendalian RTH berada di kuadran 1 yaitu strategis S-O. Strategi S-O yang direkomendasikan yaitu menata, meningkatkan serta memelihara penghijauan semua fasilitas dan membuat taman bermain lingkungan.</p>
5.	Mita Aprina (2020) [28]	Penentuan Pusat Pelayanan Perkotaan di Kota Tanjungpinang	<ul style="list-style-type: none"> • Pendekatan kuantitatif dengan analisis orde perkotaan <ul style="list-style-type: none"> – Analisis christaller – Analisis scalogram 	<ul style="list-style-type: none"> • Luas Wilayah • Jumlah Penduduk • Jumlah Fasilitas Pelayanan • Jenis Fasilitas Pelayanan 	<p>Tujuan Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi wilayah di Kota Tanjungpinang yang berpotensi sebagai Ibukota Kabupaten Kubu Raya.</p> <p>Hasil Berdasarkan hasil analisis skalogram dan interaksi keruangan yang telah dilakukan, kecamatan yang berpotensi menjadi pusat pelayanan di Kota</p>

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Analisis	Variabel	Tujuan dan Hasil
			<ul style="list-style-type: none"> – Analisis indeks sentralitas marshall – Analisis interaksi keruangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Jarak Kecamatan 	<p>Tanjungpinang adalah Kecamatan Tanjungpinang Timur, karena memiliki fasilitas terbanyak dan terlengkap di antara kecamatan yang lain, yakni 23 jenis fasilitas sebanyak 550 unit. Kecamatan Tanjungpinang Timur juga memiliki potensi untuk berkembang. Hal tersebut didukung oleh nilai interaksi ke Kecamatan Tanjungpinang Timur adalah paling tinggi sebesar 236,428,545.</p>
6.	Yanur Ramadhan (2021) [29]	Evaluasi Kesesuaian Ruang Terbuka Hijau Publik di Kecamatan Pontianak Barat	<ul style="list-style-type: none"> • Pendekatan Kuantitatif Deskriptif dengan Teknik penginderaan jauh dan Sistem Informasi Geografis (GIS) 	<ul style="list-style-type: none"> • Luas dan jenis RTH Publik • Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk • Jumlah Kebutuhan RTH Publik 	<p>Tujuan Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengevaluasi kesesuaian RTH Publik di Kecamatan Pontianak Barat.</p> <p>Hasil Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Kecamatan Pontianak Barat pada saat ini memiliki luas 123, 791 Ha atau 7,3% dari luas Kecamatan Pontianak Barat. Kebutuhan RTH Publik bedasarkan jumlah penduduk sebesar 143.060 jiwa membutuhkan 286,12 Ha lahan untuk ruang terbuka hijau publik. Kebutuhan RTH Publik berdasarkan luas Kecamatan Pontianak ialah 336,4 Ha, Sedangkan untuk rencana RTH Publik pada tahun 2033 adalah sebesar 35,05 Ha. Hasil evaluasi RTH Publik untuk perbandingan antara jumlah kebutuhan dan jumlah yang ada pada rencana RTH Publik di RTRW adalah tidak sesuai atau belum memenuhi standar kebutuhan baik dari luas maupun jumlah penduduk.</p>

Sumber : Peneliti, 2022

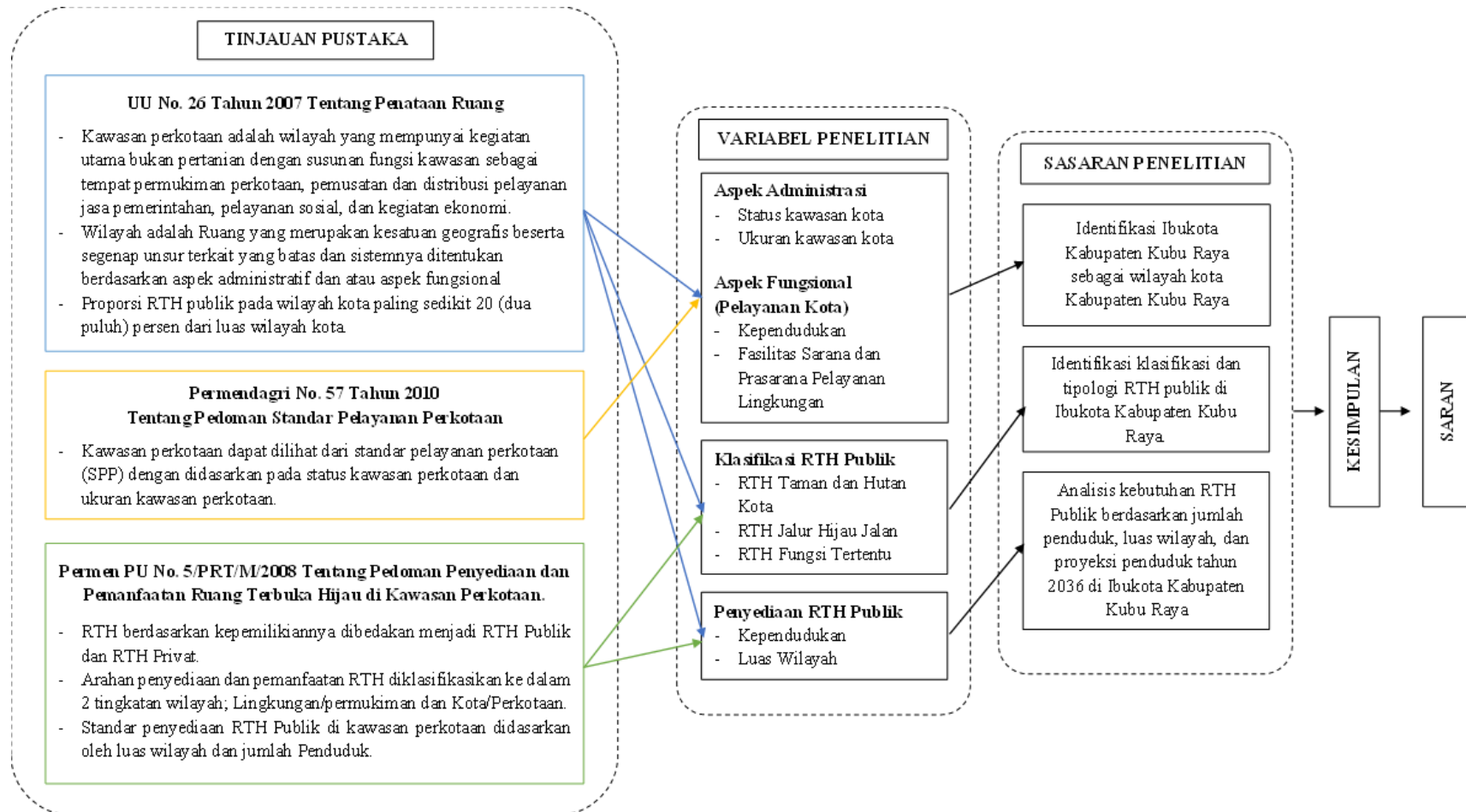
Penelitian ini memiliki perbedaan dan persamaan terhadap penelitian-penelitian terdahulu. Persamaan dan perbedaan tersebut terletak pada tujuan, metodologi, serta variabel penelitian. Sehingga pada penelitian ini menggabungkan beberapa variabel dari penelitian terdahulu.

Secara umum penelitian terkait tentang ruang terbuka hijau serta kawasan perkotaan memiliki kesamaan. Sedangkan perbedaan secara umum terletak pada tujuan, metode analisis, serta ruang lingkup penelitian. Sedangkan secara khusus, perbedaan dan persamaan yang terdapat antara penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan peneliti saat ini adalah;

- Pada penelitian yang dilakukan oleh Fauzan Maulan Shani (2015) tentang ketersediaan dan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan di Kota Sukabumi, perbedaan terdapat pada metode analisis yang digunakan untuk mengetahui ketersediaan RTH yaitu dengan menggunakan analisis interpretasi citra. Selain itu perbedaan juga terletak pada tujuan penelitian, dimana salah satu tujuan adalah untuk mengetahui pola persebaran RTH.
- Pada penelitian Alvira Nevi Sumarauw (2016) tentang analisis kebutuhan RTH Publik di Kota Bitung terdapat kesamaan pada tujuan dan variabel penelitian. Sedangkan perbedaan penelitian terdapat pada salah satu metode penelitian dimana pada penelitian Alvira, metode yang digunakan untuk menganalisis ketersediaan RTH menggunakan analisis spasial sedangkan pada penelitian ini metode yang digunakan hanya analisis deskriptif berdasarkan data primer dan sekunder yang didapat.
- Perbedaan pada penelitian analisis kebutuhan RTH Kota Sintang oleh Renie Gonie (2017) terdapat pada salah satu variabel penelitian, yaitu renie menggunakan data terkait serapan CO² sebagai bahan analisis untuk mendapatkan kebutuhan ruang terbuka hijau di Kota Sintang.
- Evaluasi pemanfaatan RTH Publik pada penelitian Gita (2019) mendasar pada persepsi masyarakat dan pada penelitian tersebut menggunakan variabel KDH untuk mengetahui ketercukupan RTH Publik serta menggunakan metode SWOT dalam mendapatkan strategi pengendalian RTH. Sedangkan pada penelitian ini kebutuhan RTH Publik menggunakan variabel jumlah penduduk dan luas wilayah untuk dapat mendapatkan besaran kebutuhan RTH Publik.

- Penentuan pusat pelayanan perkotaan di Kota Tanjungpinang didalam penelitian Mita Aprina (2020) menggunakan 4 bentuk teknik analisis yaitu analisis christaller, analisis skalogram, analisis indeks sentralitas marshall, dan analisis interaksi keruanga. Sedangkan pada penelitian ini, peneliti hanya menggunakan analisis skalogram.
- Pada peneliatian Yanur Ramadhan (2021) tentang Evaluasi Kesesuaian Ruang Terbuka Hijau Publik di Kecamatan Pontianak Barat menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan teknik penginderaan jauh dan sistem informasi geografis. Variabel yang digunakan pada penelitian ini memiliki kesamaan dengan variabel yang digunakan peneliti, dimana variabel yang digunakan adalah luas dan jenis RTH Publik, serta Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk. Sedangkan perbedaan yang terdapat adalah pada metode analisis yang digunakan. Metode analisis yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif deskriptif dengan teknik penginderaan jauh dan SIG.

2.5 Kerangka Teori



Gambar 2. 4 Kerangka Teori

Sumber : Peneliti, 2021